



ANALISIS PENCATATAN DAN PELAPORAN KEUANGAN UMKM DI KOTA PALU

SYAMSUL

STIE Panca Bhakti Palu
syamsulsyahrir@gmail.com

Abstract: *This study aims to describe the financial recording and reporting system of micro, small and medium enterprises (MSMEs). This population is 19,197 MSMEs and the research sample is 27 MSMEs in Palu City. Data were obtained through questionnaires and interviews with MSMEs. The data analysis technique used analysis descriptive. The results showed that the majority of MSMEs included in the micro-enterprise group had not recorded and reported financial statements. However, most of the small and medium-sized MSMEs have carried out financial recording and reporting both manually and computerized. Furthermore, most MSMEs have never attended financial management training, particularly financial recording and reporting. Therefore, MSMEs want training and assistance in financial recording and reporting by the government or other institutions. This information is important for the local government and related agencies in the context of counseling and mentoring business management in the future.*

Keywords: *MSMEs, Accounting Systems, Financial Statements, Financial Accounting Standards*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Populasi ini adalah sebanyak 19.197 pelaku UMKM dan sampel penelitian sebanyak 27 pelaku UMKM di Kota Palu. Data diperoleh melalui kuisioner dan wawancara kepada pelaku UMKM. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas UMKM yang termasuk dalam kelompok usaha mikro belum melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan. Akan tetapi, UMKM yang berskala kecil dan menengah sebagian besar telah melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan baik secara manual dan terkomputerisasi. Selanjutnya, sebagian besar UMKM belum pernah mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan, khususnya pencatatan dan pelaporan keuangan. Oleh karena itu, pelaku UMKM menginginkan dilakukannya pelatihan maupun pendampingan pencatatan dan pelaporan keuangan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga lainnya. Informasi ini penting bagi pihak pemerintah daerah dan instansi terkait dalam rangka penyuluhan dan pendampingan pengelolaan usaha di masa mendatang.

Kata kunci: UMKM, Sistem Akuntansi, Laporan Keuangan, Standar Akuntansi Keuangan

PENDAHULUAN

Usaha mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), memegang peran strategis dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan di Indonesia. Kontribusi UMKM sangat berarti terhadap *produk domestik bruto* (PDB), dan meningkatkan peluang kerja sehingga mereduksi tingkat pengangguran (Savitri & Saifudin, 2018). Oleh karena itu, eksistensi dan pengembangan UMKM perlu dipertahankan. Salah satunya melalui peningkatan keahlian pelaku UMKM dalam mengelola usahanya, khususnya dalam bidang keuangan. Siagian & Indra (2019) mengungkapkan bahwa pelaku UMKM tidak luput dari berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi, diantaranya dalam hal pengelolaan keuangan, utamanya dari segi pencatatan dan pelaporan keuangan usaha. Padahal, menurut Kurniawati et al. (2012) pencatatan dan pelaporan keuangan yang baik merupakan salah satu faktor utama penyebab keberhasilan UMKM.

Pencatatan dan pelaporan keuangan sangat bermanfaat sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan suatu bisnis dalam rangka pengembangan dan kesuksesan UMKM (Kurniawati

et al., 2012). Akan tetapi, sampai saat ini sebagian besar pelaku UMKM belum menerapkan pencatatan dan pelaporan keuangan berdasarkan siklus akuntansi, yang dimulai dari penyediaan bukti transaksi sampai dengan terbitnya laporan keuangan, dan tidak sejalan dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan. Argumen ini tercermin dari temuan penelitian terdahulu. Misalnya, penelitian Ramdani et al. (2018) yang bertujuan menelusuri permasalahan pencatatan laporan keuangan berbasis SAK ETAP pada UMKM Warkop di Kota Makassar. Temuan mereka mengindikasikan bahwa pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang disusun pengelola UMKM Warkop, hanya sebatas laporan bisnis sesuai dengan pemahaman dan kebutuhan mereka saja. Kemudian, Savitri & Saifudin (2018) meneliti tentang bagaimana praktik pencatatan akuntansi dan persepsi pemilik UMKM terhadap pencatatan akuntansi. Hasilnya, menunjukkan bahwa UMKM MR. Pelagi Semarang, yang menjadi subjek penelitian mereka ternyata belum maksimal dalam menerapkan sistem pencatatan akuntansi, karena pemilik berpendapat bahwa akuntansi merupakan masalah yang rumit. Selanjutnya, penelitian Siagian & Indra (2019) bertujuan mengetahui pengetahuan akuntansi pelaku UMKM. Hasil analisis mengindikasikan bahwa pelaku usaha mikro telah menyusun laporan keuangan atau catatan pembukuan meskipun terbilang sederhana. Selain itu, mereka juga menginformasikan bahwa pengelola UMKM masih kesulitan untuk membuat laporan keuangan sebagaimana mestinya. Terakhir, penelitian Suryani & Subardjo (2020) dengan desain penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif dan interpretatif. Hasilnya, menunjukkan bahwa seluruh informan penelitian telah melakukan pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan, tetapi masih sangat sederhana dan didasarkan pada pemahaman tiap pelaku UMKM. Sejatinya, dengan pencatatan dan pelaporan keuangan yang memadai, UMKM dapat memenuhi persyaratan dalam pengajuan kredit yaitu laporan keuangan, menilai kinerja, menganalisis posisi keuangan, dan mengetahui jumlah pajak (Warsono & Darmawan, 2010).

Beberapa penelitian yang ada, lihat Salmiah et al. (2018), Savitri & Saifudin (2018), Ramdani et al. (2018) Siagian & Indra (2019), Suryani & Subardjo (2020) belum mengungkapkan secara utuh setiap tahapan pencatatan dan pelaporan keuangan, dengan kata lain penelitian tersebut dalam mengkaji pengelolaan keuangan UMKM belum sesuai dengan siklus akuntansi. Padahal, informasi tentang itu sangat bermanfaat dalam menyampaikan sampai sejauhmana praktik pencatatan dan pelaporan keuangan dilakukan oleh pelaku UMKM. Informasi ini penting untuk diketahui sebagai bahan evaluasi bagi pengambil kebijakan dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini hadir dalam rangka memberikan gambaran secara utuh dari setiap tahapan pencatatan dan pelaporan keuangan UMKM berdasarkan siklus akuntansi, mulai dari bukti transaksi hingga penyusunan laporan keuangan. Secara khusus, pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana pencatatan dan pelaporan UMKM di Kota Palu? Dengan mengetahui jawaban atas pertanyaan penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan rujukan oleh Pemerintah Kota Palu dan dinas terkait, maupun lembaga lainnya dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan UMKM di Kota Palu, ditinjau dari segi pencatatan dan pelaporan keuangan.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), disebutkan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Kriterianya yaitu jumlah kekayaan bersih yang dimiliki lebih kecil dari atau sama dengan Rp50.000.000,00 dengan total penjualan tahunan tidak lebih dari Rp300.000.000,00. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha bukan merupakan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Kriterianya, yaitu mempunyai kekayaan bersih diatas dari Rp50.000.000,00 sampai batas paling banyak Rp500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan mendapatkan omzet penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 sampai

dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00. Kemudian, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Kriteria usaha menengah, yaitu kekayaan bersih lebih besar dari Rp500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan omzet penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 sampai paling banyak Rp50.000.000.000,00. Intinya, UMKM adalah aktivitas bisnis yang dibentuk oleh masyarakat, baik berupa usaha perorangan maupun badan usaha (Farida, 2016) yang memenuhi kriteria UMKM yang ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut Jusup (2016:4) akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis mengolah data menjadi laporan, dan mengomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Lebih lanjut, Jusup (2016:5) mendefinisikan akuntansi dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pemakai jasa akuntansi, dan dari sudut proses kegiatannya. Dilihat dari sudut pemakainya, akuntansi adalah sebagai suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu entitas. Sementara itu, dari sudut kegiatannya, akuntansi adalah sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu entitas. Intinya, akuntansi adalah sebuah proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan aktivitas keuangan perusahaan kepada pemangku kepentingan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal. Selanjutnya, siklus akuntansi adalah tahapan kegiatan dalam proses pencatatan dan pelaporan akuntansi, berawal dari terjadinya transaksi hingga terbitnya laporan keuangan. Menurut Soemarso (2004:110) siklus akuntansi dimulai dari transaksi dan bukti transaksi, jurnal, buku besar, daftar saldo, kertas kerja dan jurnal penyesuaian, laporan keuangan, jurnal penutup, daftar saldo penutup, jurnal pembalik. Secara umum terdapat lima laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CaLK). Kelima laporan tersebut, masing-masing mempunyai fungsi menyediakan informasi yang berkaitan dengan posisi bisnis suatu usaha (Kurniwati et al., 2012).

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Standar ini merupakan pedoman bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Dengan adanya SAK ETAP, usaha kecil dan menengah dapat menyusun sendiri laporan keuangan dan laporan tersebut diaudit dan memperoleh opini audit. Sehingga, laporan tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan dana (misalnya dari Bank) untuk pengembangan usaha (Martani et al., 2012). Pada intinya, SAK ETAP ini disusun, bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam implementasinya dan memberikan kemudahan akses ETAP kepada sumber pendanaan dari perbankan (Hetika & Mahmudah, 2017). Adapun jenis laporan keuangan menurut SAK ETAP terdiri dari Laporan Neraca, Laba Rugi, Perubahan Modal, Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Selanjutnya, standar Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (EMKM) merupakan pedoman untuk entitas yang lebih dikhususkan bagi pemilik usaha yang telah memenuhi kriteria sesuai dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut Suryani & Subardjo (2020) standar EMKM ditetapkan sebagai bentuk penyederhanaan dari SAK ETAP, namun laporan keuangannya tetap memenuhi kebutuhan yang diharapkan pelaku bisnis. Meskipun, bentuknya penyederhanaan, standar ini diharapkan mengurangi anggapan *negative* pelaku usaha bahwa pencatatan dan pelaporan keuangan dalam akuntansi itu merupakan aktivitas yang sulit. Penyajian laporan keuangan berdasarkan pada SAK EMKM, hanya terdapat tiga laporan keuangan yang harus dipersiapkan oleh entitas, yaitu Laporan Laba Rugi, Laporan Posisi Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, dimaksudkan untuk menjelaskan tentang pencatatan dan pelaporan keuangan UMKM. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dan kuisisioner. Populasi penelitian berjumlah 19.197 Pelaku UMKM di Kota Palu. Data tersebut, di peroleh dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palu Tahun 2020. Teknik penetapan sampel menggunakan rumus slovin dengan tingkat kesalahan 15 persen, sehingga sampel penelitian ini sebanyak 44 pelaku UMKM. Akan tetapi, terdapat beberapa kuisisioner yang dibagikan tidak diisi lengkap, sehingga tersisa 27 kuisisioner yang dapat diolah. Pada penelitian ini pencatatan dan pelaporan keuangan didefinisikan sebagai sebuah sistem pengelolaan keuangan UMKM dimulai dari bukti transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Adapun dimensi dan indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Dimensi dan Indikator Objek Penelitian

Dimensi	Indikator
- Transaksi	- Bukti Transaksi
	- Penjualan (Pendapatan) Kredit
	- Penjualan (Pendapatan) Tunai
- Jurnal	- Pembelian Kredit
	- Pembelian Tunai
	- Penerimaan Uang (Kas Masuk)
	- Pengeluaran Uang (Kas Keluar)
	- Kas
	- Piutang
	- Persediaan
	- Pelengkapan
	- Aset Tetap
- Buku Besar	- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
	- Utang
	- Modal
	- Prive
	- Penjualan (Pendapatan)
	- Pembelian
	- Beban-Beban
- Neraca Saldo	- Neraca Saldo
- Jurnal Penyesuaian	- Jurnal Penyesuaian
- Kertas Kerja	- Kertas Kerja
	- Laporan Laba Rugi
- Laporan Keuangan	- Laporan Perubahan Modal
	- Laporan Neraca
	- Laporan Arus Kas
	- Catatan Atas Laporan Keuangan
- Jurnal Penutup	- Jurnal Penutup
- Neraca Saldo Setelah Penutupan	- Neraca Saldo Setelah Penutupan

Sumber: diolah dari berbagai literature (2021)

Secara khusus, pengukuran unit analisis (objek penelitian) menggunakan skor dikotomi. Setiap item pertanyaan pada kuisioner yang dijawab “Ya” oleh responden diberi nilai 1, dan untuk item pertanyaan yang dijawab “Tidak” diberi nilai 0. Selanjutnya, dihitung jumlah responden yang menjawab “Ya” dan jumlah responden yang menjawab “Tidak” dari setiap item pertanyaan. Kemudian, data tersebut diolah dengan menggunakan analisis deskriptif dan diberikan penjelasan tambahan melalui hasil wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pada tabel 2, dapat dijelaskan bahwa pelaku UMKM yang terlibat dalam penelitian ini, mayoritas UMKM yang berbentuk perseorangan, yaitu sebanyak 81,48 persen. Kemudian, UMKM tersebut sebagian besar berjenis usaha dagang yaitu sebanyak 70,37 persen.

Tabel 2. Deskripsi Bentuk, dan Jenis Usaha Responden

Bentuk Usaha	Jumlah	%	Jenis Usaha	Jumlah	%
Perseorangan	22	81,48	Jasa	6	22,22
CV	3	11,11	Dagang	19	70,37
PT	2	7,41	Manufaktur	2	7,41
Total	27	100	Total	27	100

Sumber: Data primer diolah (2021)

Kemudian, tabel 3 juga terlihat bahwa responden atau pengelola UMKM yang terlibat dalam survei ini adalah sebagian berjenis kelamin laki-laki sebesar 59,26 persen, dan memiliki tingkat pendidikan mayoritas sarjana yaitu 40,74 persen.

Tabel 3. Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan

Jenis Kelamin	Jumlah	%	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
Laki-Laki	16	59,26	SD	1	3,70
Perempuan	11	40,74	SMP	5	18,52
			SMA	10	37,04
			Sarjana	11	40,74
Total	27	100	Total	27	100

Sumber: Data primer diolah (2021)

Selanjutnya, pada tabel 4 dapat disampaikan bahwa transaksi yang paling sering dicatat oleh pelaku UMKM adalah transaksi penjualan saja, baik secara tunai maupun kredit. Pencatatan keuangan khususnya pada UMKM yang berskala mikro, pencatatan yang dilakukan sebatas mencatat jumlah barang yang dijual, itupun tidak semua transaksi dicatat seperti itu, dengan istilah lain kadang-kadang mereka melakukan pencatatan. Kondisi ini, diperjelas dari hasil wawancara pelaku usaha, sebagai berikut.

“...usaha ini pencatatan tidak dilakukan secara detail, hanya seadanya saja. Untuk mengetahui berapa pemasukan dan pengeluaran setiap bulannya...” (I Melda Candra Pemilik Joyful Bakery)

“...untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan...” (Serni Dewangga Pemilik Warung Morut Sederhana)

“...kurangnya pengetahuan dalam pembuatan pencatatan jadi catat yang seperlunya seperti hasil-hasil penjualan per hari lalu diakumulasikan di akhir bulan ya begitu saja pencatatannya...” (Mukli Pemilik Somai Mujur).

Tabel 4. Pencatatan Transaksi UMKM

No.	Transaksi yang Dicatat dalam Jurnal	UMKM				Jumlah	
		Mencatat		Tidak Mencatat		UMKM	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Total	%
1	Penjualan (Pendapatan) Kredit	12	44,44	15	55,56	27	100
2	Penjualan (Pendapatan) Tunai	12	44,44	15	55,56	27	100
3	Pembelian Kredit	6	22,22	21	77,78	27	100
4	Pembelian Tunai	6	22,22	21	77,78	27	100
5	Penerimaan Uang (Kas Masuk)	4	14,81	23	85,19	27	100
6	Pengeluaran Uang (Kas Keluar)	6	22,22	21	77,78	27	100

Sumber: Data primer diolah (2021)

Selain itu, hasil survei ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM melakukan pencatatan keuangan semata-mata hanya bertujuan mengetahui jumlah pemasukan dan pengeluaran. Hasil ini sesuai dengan temuan Ramdani et al. (2018) yang menginformasikan bahwa komponen yang dilaporkan oleh pengelola UMKM, lebih dominan hanya sebatas pencatatan kas masuk dan kas keluar.

Tabel 5. Penyusunan Buku Besar UMKM

No.	Menyusun Buku Besar	UMKM				Jumlah	
		Membuat		Tidak Membuat		UMKM	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Total	%
1	Kas	11	40,74	16	59,26	27	100
2	Piutang	9	33,33	18	66,67	27	100
3	Persediaan	12	44,44	15	55,56	27	100
4	Pelengkapan	7	25,93	20	74,07	27	100
5	Aset Tetap	9	33,33	18	66,67	27	100
6	Ak. Penyusutan Aset Tetap	4	14,81	23	85,19	27	100
7	Utang	11	40,74	16	59,26	27	100
8	Modal	9	33,33	18	66,67	27	100
9	Prive	5	18,52	22	81,48	27	100
10	Penjualan (Pendapatan)	15	55,56	12	44,44	27	100
11	Pembelian	15	55,56	12	44,44	27	100
12	Beban-Beban	12	44,44	15	55,56	27	100

Sumber: Data primer diolah (2021)

Pada tabel 5, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pelaku UMKM tidak menyusun buku besar dalam pengelolaan keuangan usaha mereka. Selain itu, terlihat bahwa pelaku UMKM yang menyusun buku besar penjualan dan pembelian masing-masing sebesar 55,56 persen. Setelah itu, pelaku UMKM yang menyusun buku besar beban-beban dan persediaan masing sebesar 44,44 persen, penyusunan buku besar kas dan utang hanya sebesar 40,74 persen dari seluruh pelaku UMKM yang diteliti. Sementara itu, juga terekam kurang dari 40 persen pelaku UMKM yang menyusun buku besar lainnya. Fakta ini, menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM hanya menyusun buku besar penjualan, pembelian, beban, persediaan, kas dan utang sebagai laporan dari pengelolaan keuangan usaha mereka. Hasil wawancara dengan pelaku usaha juga membuktikan kondisi tersebut.

"....secara rinci sampai pembuatan neraca dan buku besar saya tidak paham, apalagi bagi saya yang tidak mempunyai dasar dibidang itu...." (Patina Pemilik Bakery Kue Tradisional)

“...pencatatan atau pembukuan yang perlu dilakukan hanyalah berupa pembelian bahan baku yang digunakan setiap harinya, seperti sabun bubuk dan sampo motor. Dan juga pencatatan keuangan yang masuk setiap harinya...” (Agung Hirawan Pemilik Cuci Motor Swaha).

Pada tabel 6, terlihat bahwa hanya beberapa pelaku UMKM yang menyusun laporan keuangan berupa laporan laba rugi dan perubahan modal, yaitu sekitar 25 persen dari seluruh UMKM yang ditelusuri. Sementara itu, pelaku UMKM yang menyusun laporan neraca, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan kurang dari 25 persen. Angka ini, menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM belum menyusun laporan keuangan atas usaha yang mereka jalankan. Kemudian, berdasarkan penelusuran ditemukan bahwa pelaku UMKM yang menyusun laporan keuangan adalah UMKM yang tergolong dalam bentuk usaha CV dan PT dengan kategori usaha kecil dan menengah.

Tabel 6. Penyusunan Laporan Keuangan UMKM

No.	Menyusun Laporan Keuangan	UMKM				Jumlah	
		Menyusun		Tidak Menyusun		UMKM	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Total	%
1	Laporan Laba Rugi	7	25,93	20	74,07	27	100
2	Laporan Perubahan Modal	7	25,93	20	74,07	27	100
3	Laporan Neraca	6	22,22	21	77,78	27	100
4	Laporan Arus Kas	6	22,22	21	77,78	27	100
5	Catatan Atas Laporan Keuangan	6	22,22	21	77,78	27	100

Sumber: Data primer diolah (2021)

Sederhananya, mayoritas pelaku UMKM belum menyusun laporan keuangan sebagaimana mestinya, utamanya UMKM yang masih masuk dalam kategori usaha kecil. Hal ini sesuai dengan ungkapan pelaku usaha berikut ini.

“...kami tidak bisa melakukan atau membuat catatan keuangan sebagaimana mestinya...”

(Gladis Taga Pemilik Depot Lahiro)

“...kami tidak pencatatan keuangan karena kurangnya pengetahuan tentang ilmu akuntansi...”.

(Dodi Jhon Sampouw Pemilik Rumah Makan Seafood Banggai)

“...tidak melakukan pencatatan keuangan, karena belum terlalu menguasai tentang pembukuan pencatatan keuangan...” (Asnawati Pemilik Anugrah Indah)

Hasil ini sesuai dengan temuan Savitri & Saifudin (2018) mengemukakan bahwa pembukuan bagi pelaku UMKM merupakan sesuatu yang sulit dilaksanakan, disebabkan sempitnya pemahaman mereka tentang ilmu akuntansi, bahkan sebagian dari pelaku UMKM beranggapan bahwa laporan keuangan bukanlah hal yang penting untuk disusun. Akan tetapi, kondisi ini sangat berbeda dengan Pelaku UMKM yang masuk dalam kategori usaha kecil dan menengah mayoritas sudah mengoperasikan sistem kompetensi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan usaha. Fakta ini tercermin dari kutipan wawancara berikut ini.

“.... Sistem pencatatan keuangan perusahaan ini sudah berbasis komputer, makanya lebih mudah....” (Johny Limbunan Pemilik PT Patrako Abadi)

Sederhananya, pada tabel 7 terlihat bahwa mayoritas pelaku UMKM yang diteliti tidak menerapkan sistem akuntansi dalam pencatatan (pengelolaan) keuangan usaha mereka. Dapat dilihat pada tabel tersebut, bahwa lebih dari 50 persen pelaku usaha tidak menjalankan prosedur akuntansi dalam pengelolaan keuangan mereka, mulai dari penyediaan bukti transaksi, pembuatan jurnal, buku besar, neraca saldo, penyusunan jurnal penyesuaian, kertas kerja, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan. Kondisi ini pun, tercermin dari hasil kutipan wawancara pelaku UMKM, sebagai berikut.

“.... Memang pencatatan keuangan itu penting, tetapi karena usaha yang berjalan usaha kecil, makanya saya tidak menggunakan pencatatan keuangan....” (Moh. Fauzan Pemilik Fauzan Babershop).

“.... saya enggan membuat catatan keuangan, dengan cara saya sendiri saya dapat mengetahui dengan mudah jumlah uang yang keluar dan masuk....” (Purnomo Pemilik Kartika Motor).

Tabel 7. Penerapan Sistem Akuntansi UMKM

No.	Penerapan Sistem Akuntansi	UMKM				Jumlah	
		Membuat		Tidak Membuat		UMKM	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Total	%
1	Bukti Transaksi	12	44,44	15	55,56	27	100
2	Jurnal	12	44,44	15	55,56	27	100
3	Buku Besar	6	22,22	21	77,78	27	100
4	Neraca Saldo	6	22,22	21	77,78	27	100
5	Jurnal Penyesuaian	4	14,81	23	85,19	27	100
6	Kertas Kerja	6	22,22	21	77,78	27	100
7	Laporan Keuangan	6	22,22	21	77,78	27	100
8	Jurnal Penutup	6	22,22	21	77,78	27	100
9	Neraca Saldo Setelah Penutupan	6	22,22	21	77,78	27	100

Sumber: Data primer diolah (2021)

Merujuk pada hasil survei ini, dapat dijelaskan bahwa yang paling banyak disusun oleh pelaku UMKM dari setiap tahapan pencatatan, yaitu hanya pada penyediaan bukti transaksi dan pencatatan ke dalam jurnal. Mereka hanya membuat catatan sederhana, dimana catatan tersebut memperlihatkan jumlah pembelian (modal barang) dan penjualan (omzet penjualan). Sehingga, jika mereka ingin mengetahui apakah terjadi laba atau rugi, yaitu mereka tinggal membandingkan antara jumlah penjualan dengan jumlah pembelian. Ketika jumlah penjualan lebih tinggi daripada jumlah pembelian, selisihnya itulah yang disebut untung (laba). Sebaliknya, jika jumlah penjualan lebih kecil daripada jumlah pembelian, kelebihannya itu mereka sebut rugi. Sampai pada tahapan itu saja, itupun tidak seperti yang terdapat dalam literatur-literatur akuntansi maupun standar akuntansi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, sebagian besar para pelaku UMKM belum memiliki sistem pencatatan keuangan sebagaimana mestinya, artinya tidak sesuai dengan sistem akuntansi.

Pelaku UMKM yang tidak membuat pencatatan dan pelaporan keuangan usaha, karena memang mereka sama sekali belum mengetahuinya. Meskipun, terdapat UMKM khususnya yang termasuk dalam kelompok mikro melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan, namun belum sesuai dengan sistem akuntansi. Artinya, pencatatan keuangan yang diterapkan belum mengikuti tahapan-tahapan di dalam siklus akuntansi, dan pencatatan tersebut hanya dapat dipahami oleh pelaku UMKM itu sendiri. Hasil ini, sejalan dengan Salmiah et al. (2018) yang menemukan bahwa penerapan akuntansi bagi UMKM masih sangat sederhana atau tidak mengikuti tahapan-tahapan dalam siklus akuntansi. Begitupula, penelitian Ramdani et al. (2018) yang mengemukakan bahwa pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang dilakukan pengelola usaha hanya sebatas laporan bisnis yang dibuat sesuai dengan pemahaman dan kebutuhan masing-masing pengelola UMKM. Mestinya, hasil dari pencatatan dan pelaporan keuangan tersebut juga dapat memberikan informasi kepada pihak eksternal tentang kondisi keuangan perusahaan, sehingga memenuhi karakteristik informasi yaitu mudah dipahami, relevan dan akurat (Alfitri et al., 2014).

Selanjutnya, pelaku UMKM juga mengatakan bahwa selama ini memang mereka belum pernah terlibat dalam pelatihan pengelolaan keuangan instansi pemerintah maupun lembaga-lembaga lainnya.

“...saya tidak pernah mendapat pelajaran tentang keuangan...”. (Agung Hirawan Pemilik Cuci Motor Swaha)

Kemudian, pelaku UMKM juga memiliki harapan untuk diberikan pelatihan khusus tentang pengelolaan keuangan yang sederhana dan mudah dipahami. Seperti yang disampaikan oleh pelaku UMKM pada kutipan wawancara berikut.

“... agar kedepannya bisa mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan untuk usaha...” (Gladis Taqa Pemilik Depot Lahiro)

“...kedepannya ada yang mengajari masalah keuangan yang benar...” (Agung Hirawan Pemilik Cuci Motor Swaha)

“...dilakukan bimbingan berupa pelatihan pengelolaan usaha...” (Gisel Pemilik Kios Gisel)

“...harapannya pemerintah menyediakan pelatihan pencatatan keuangan khususnya pada yang mempunyai usaha...” (Asnawati Pemilik Anugrah Indah).

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang masih berskala mikro belum melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sebagaimana mestinya, hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman mereka dibidang tersebut. Hasil ini menguatkan argumentansi dari Savitri & Saifudin (2018) yang menjelaskan bahwa pelaku UMKM tidak mengetahui bagaimana pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang baik dan benar. Dengan demikian, diperlukan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku UMKM, utamanya dibidang pencatatan dan pelaporan keuangan usaha. Sementara itu, pelaku UMKM yang tergolong dalam kelompok usaha kecil dan menengah sebagian besar telah menerapkan pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai dengan tahapan dalam siklus akuntansi. Pencatatan dan pelaporan keuangan mereka pun, telah berbasis komputer (*software*).

Selanjutnya, penerapan pencatatan dan pelaporan keuangan, pelaku UMKM dapat mengetahui kondisi usahanya, apakah terjadi perkembangan ataukah penurunan kinerja perusahaan dari tahun ke tahun. Bahkan, dapat memberikan informasi posisi keuangan perusahaan, besarnya pemasukan dan pengeluaran perusahaan, dan informasi perubahan modal dari periode ke periode, serta jumlah pajak yang harus dibayar. Selain itu, dengan adanya laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya dapat digunakan oleh pelaku UMKM dalam berbagai tujuan. Misalnya, memenuhi persyaratan untuk memperoleh tambahan modal pengembangan usaha dari pihak kreditur. Dengan kata lain, apabila pelaku UMKM konsisten dalam melaksanakan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan dengan baik dan memadai. Maka, berbagai macam manfaat yang diperoleh dari laporan keuangan tersebut untuk pengembangan usaha di masa mendatang, utamanya UMKM di Kota Palu.

PENUTUP

Penelitian ini menginformasikan bahwa mayoritas pelaku UMKM yang berskala mikro di Kota Palu tidak melakukan pencatatan keuangan dari semua jenis transaksi yang terjadi, tidak menyediakan buku besar, dan belum menyusun laporan keuangan. Artinya, pelaku UMKM di Kota Palu belum menerapkan sistem akuntansi dalam pencatatan (pengelolaan) keuangan usahanya. Namun demikian, untuk UMKM yang berskala kecil dan menengah sebagian besar telah menerapkan pencatatan dan pelaporan keuangan, baik secara manual dan terkomputerisasi.

Penelitian ini terbatas dilakukan pada beberapa UMKM saja yang di Kota Palu, dan didominasi UMKM berskala mikro. Oleh karena itu, saran untuk penelitian selanjutnya dapat mengambil sampel penelitian yang lebih berimbang dari setiap kelompok UMKM, sehingga lebih kelihatan perbedaan antara pencatatan dan pelaporan keuangan UMKM berskala mikro, kecil, dan menengah. Penelitian lain, juga dapat mengidentifikasi faktor – faktor pendukung dan penghambat penerapan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan pelaku UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri, A., Ngadiman, & Sohidin. (2014). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Perajin Mebel Desa Gondangsari Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten. *Jupe UNS*, 2(2), 135–147.
- Farida, U. I. (2016). *Akuntansi Untuk Umkm* (F. Nurhayani (ed.); 1st ed.). Penerbit CV Kekata Group. http://eprints.umpo.ac.id/2828/5/UMKM_LAYFIX.pdf
- Hetika, H., & Mahmudah, N. (2017). Penerapan Akuntansi Dan Kesesuaiannya Dengan Sak Etap Pada Umkm Kota Tegal. *JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI Dan MANAJEMEN BISNIS*, 5(2), 259. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v5i2.531>
- Jusup, A. H. (2016). *Dasar-dasar Akuntansi Jilid 1 (IV)*. Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Kurniwati, E. P., Nugroho, P. I., & Arifin, C. (2012). Penerapan Pencatatan dan Laporan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). *Informatics and Business Insitute Darmajaya*, 2(2), 1–10. <https://doi.org/10.31294/jabdimas.v2i2.5818>
- Martani, D., Veronica, S., Wardhani, R., Farahmita, A., & Tanujaya, E. (2012). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Salemba Empat.
- Ramdani, M. R., Kamidin, M., & Ajmal, A. (2018). Implementasi SAK-ETAP Pada UMKM Warkop di Kota Makassar. *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*, 3(2), 0–19.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Sekretariat Negara.
- Salmiah, N., Indarti Siregar, & Fitri, I. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi dan Kesesuaiannya Dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Pada UMKM di Kecamatan Sukajadi Binaan DisKop & UMKM Kota Pekanbaru). *Jurnal Akuntansi*, 3(2), 212–226.
- Savitri, R. V., & Saifudin, . . (2018). Pencatatan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Pada Umkm Mr. Pelangi Semarang). *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 5(2), 117–125. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v5i2.20808>
- Siagian, A. O., & Indra, N. (2019). Pengetahuan Akuntansi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Laporan Keuangan. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(1), 41–57.
- Soemarso. (2004). *Akuntansi Suatu Pengantar Buku 1*. Salemba Empat.
- Suryani, N. H., & Subardjo, A. (2020). Penerapan Akuntansi Pelaku UMKM dan Kesesuaiannya Dengan SAK EMKM. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9.
- Warsono, S., & Darmawan, A. (2010). *Akuntansi UMKM Ternyata Mudah Dipahami dan Dipraktikkan*. Asgard Chapter.